

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Domai, Tjahjanulin. *Dari Pemerintahan Ke Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Depdagri, 2005.
- Efendi, Sofian. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Lokakarya Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005.
- Hertifa, Sumarto. *Inovasi, Patisipasi Dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin, 2011.
- Setyadiharja, Rendra. *E-Procurement: Dinamika Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik*. Sleman: deepublish, 2017.
- Siagian, Sondang P. *Peranan Staf Dan Manajemen*. Jakarta, 2001.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. *Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 2000.
- World Bank. *Governance: The World Bank's Experiences*. Washington: The World Bank Publication, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

C. Jurnal Ilmiah

- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Damayunita, Aina. "Analisis Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lembaga Pemerintah Kota

- Palangkaraya Aina.” *Jurnal Manajemen Dan Sains* 7, no. 2 (2022): 1004–7. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>.
- Dayanti, Chrisna, Agung Basuki Prasetyo, and Rinitami Njatrijani. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan E-Procurement Terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2).” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–13.
- Hardjaloka, Loura. “Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>.
- Kharisma, Bayu. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan).” *Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2014).
- Lestari, Bhekti Arum, and Lina Miftahul Jannah. “Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 9, no. 1 (2019).
<http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/article/view/339>.
- Palar Meylinda, Vincensya Pingkan, Kadek Cahya Susila Wibawa, and Solechan. “Establishing Good Governance Through Value Implementation of Money Principles in Public Procurement Policy Context.” *Journal Pembaharuan Hukum* 8, no. 2 (2021): 205–17.

Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia” 2, no. 4 (2019): 615–28.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.

———. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.

D. Skripsi/Tesis Yang Dipublikasikan

Putri, Amelia Anisah. “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Tegal.” Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Saputro, Andi. “Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Unit Kerja Barang Jasa Provinsi Jambi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Aturan Turunannya.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/10302/>.

E. Artikel dan Internet

Heryana, A., & Unggul, U. E. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Prodi Kesehatan Masyarakat – Universitas Esa Unggul*, 2018. eprints.polsri.ac.id.

Indonesian Corruption Watch (ICW). “Reformasi Pengadaan Publik: Sudah Sejauh Mana?,” 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/satu-dekade-pbj-di-indonesia>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. “Dokumen Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.” 2014. <https://www.scribd.com/doc/266384684/Dokumen-Standar-LPSE-2014#>.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan. “Warta Eproc: Standarisasi LPSE.” Publikasi Layanan E-Procurement Kementerian Keuangan. 2018. <http://www.romadan.kemenkeu.go.id/Eproc/GetPdfFile?fileName=FIX%20-%20 Warta%20XIX%20Pages%2002.pdf>.

Sutrisno, Bambang. “Peranan Masyarakat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Lawang Post, 2022. <https://www.lawangpost.com/read/peranan-masyarakat-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/1844/\>.

F. Wawancara

Nusanto, Tito Palawa. Wawancara pribadi dengan Alfina Damayanti. 7 Desember 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset/Penelitian Badan Kesbangpol Kabupaten Kuningan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 905 /UN7.F1/AK/XI/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

18 NOV 2022

Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kuningan
Jl. R.E. Martadinata No. 94 Ciporang
Kuningan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Alfina Damayanti
NIM : 11000119130519
Alamat : Bukit Cemara Residence No. 9R
nomor HP : 08122880581
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Optimalisasi Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Digital Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Rejo Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196911191993032002

Lampiran 2. Surat Permohonan Riset/Penelitian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : *efef* UN7.FI/AK/XI/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

16 NOV 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Alfina Damayanti
NIM : 11000119130519
Alamat : Bukit Cemara Residence No. 9R
nomor HP : 08122880581
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Optimalisasi Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Digital Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIM 1191993032002

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset/Penelitian Badan Kesbangpol Kabupaten Kuningan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan RE. Martadinata No. 94 Ciporang Telp. (0232) 872678 KUNINGAN Kode Pos 45515
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 072/ 432 /Tahbang/2022	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 2. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kuningan. 3. Surat dari Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Nomor : 505/UN7.FI/AK/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 Perihal Permohonan Riset/ Penelitian
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan, dengan ini menerangkan akan dilaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Kuningan dengan data peneliti, objek dan lokasi penelitian sebagai berikut :	
Nama	: ALFINA DAMAYANTI
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM/NIP/NIK/NID	: 11000119130519
Alamat	: Desa Cikeusal No 06 RT.01 RW.04 Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan
Maksud	: Izin Penelitian/Riset
Keperluan	: Skripsi
Judul/Topik Penelitian	: Optimalisasi Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Digital Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan
Waktu Penelitian	: 06 Desember 2022 s/d 30 Januari 2023
Peserta Penelitian	: 1 (satu) orang
Penanggung jawab	: Prof.Dr.,Retno Saraswati,S.H.,M.Hum.
Lokasi Penelitian	: Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Dengan ketentuan :	
1. Agar terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan aparat terkait serta memelihara hubungan baik dengan aparat dan masyarakat setempat.	
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyimpang dari kegiatan yang telah ditetapkan.	
3. Mengingat masih dalam pandemi covid-19, dalam melaksanakan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19	
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya penelitian.	
5. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.	
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Kuningan, 05 Desember 2022	
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUNINGAN KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN POLITIK	
 Drs. H. HIDAYAT SALEH Pembina NIP. 19661208 199303 1 004	
Tembusan :	
1. Bupati Kuningan (sebagai laporan)	
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kuningan (sebagai laporan)	
3. Kepala Bagian Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Kuningan	
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dipengoro	
5. Pemohon	

Lampiran 4. Surat Keterangan Riset/Penelitian Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045
KUNINGAN

Kode Pos 45512

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 21 /BPBJ

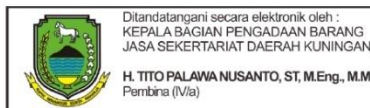
Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Menerangkan bahwa :

Nama : **Alfina Damayanti**
NIM : 11000119130519
Alamat : Bukit cemara residence No.9R
Universitas : Universitas Diponegoro Semarang
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : *Optimalisasi Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Digital Pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan.*

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan Riset/Penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN KUNINGAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Berita Acara Kesepakatan Bersama Penetapan Target Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE dan Kematangan UKPBJ Level Proaktif Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 - 4230963
Faksimili (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id. e-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN TARGET PEMENUHAN 17 STANDAR LPSE DAN KEMATANGAN
UKPBJ LEVEL PROAKTIF KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
Nomor 24/PR.11.01./PBJ**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Jl. Kota Bukit Indah Raya Blok L Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, telah dilakukan Pertemuan Pembahasan Target Pemenuhan 17 Standar LPSE se Jawa Barat dalam rangka pemenuhan Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota Level Proaktif, yang dihadiri oleh masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang ada, dengan ini kami menyatakan dan menyepakati penetapan target pemenuhan 17 standar LPSE & pemenuhan kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota level Proaktif se-Jawa Barat beserta waktu pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel Target Pemenuhan 17 Standar LPSE

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Standar yang telah terpenuhi	Target Jumlah Standar yang akan Dipenuhi	Tercapai pada
1	Kabupaten Pangandaran	0	9	Desember 2022
2	Kota Sukabumi	0	9	Desember 2022
3	Kabupaten Purwakarta	3	12	Desember 2022
4	Kabupaten Cirebon	7	-	
5	Kabupaten Garut	9	17	Desember 2022
6	Kabupaten Sukabumi	9	17	Desember 2022
7	Kota Banjar	9	12	Desember 2022
8	Kota Cimahi	9	17	Desember 2022
9	Kota Cirebon	9	17	Desember 2022
10	Kabupaten Bekasi	10	-	
11	Kabupaten Tasikmalaya	11	15	Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

12	Kota Tasikmalaya	11	17	Desember 2022
13	Kabupaten Cianjur	12	15	Desember 2022
14	Kabupaten Kuningan	12	17	Desember 2022
15	Kabupaten Sumedang	12	17	Desember 2022
16	Kabupaten Indramayu	16	17	Desember 2022

Tabel Target Pemenuhan Kematangan UKPBJ

No	Nama Kabupaten/Kota	Pencapaian Kematangan UKPBJ	Target Pencapaian Kematangan UKPBJ	Tercapai pada
1	Kabupaten Karawang	6/9	9/9	Desember 2022
2	Kabupaten Bandung	7/9	9/9	Desember 2022
3	Kabupaten Ciamis	7/9	9/9	Desember 2022
4	Kabupaten Majalengka	7/9	9/9	Desember 2022
5	Kabupaten Bandung Barat	8/9	9/9	Desember 2022
6	Kabupaten Bogor	8/9	9/9	Desember 2022
7	Kabupaten Subang	8/9	9/9	Desember 2022
8	Kota Bogor	8/9	9/9	Desember 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

Dibuat di Purwakarta,
Tanggal 30 Maret 2022

Perwakilan UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Perwakilan UKPBJ Kota Cimahi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  BUDHI SURIAPERMANA, S.KOM Penata Tingkat I NIP. 19690302 200801 1 007	Perwakilan UKPBJ Kota Cirebon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda  Susi Agustini, S.H., M.M Penata Tingkat I NIP. 19760812 200901 2 003
--	---

Lampiran 6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 8000/KPTS.671-BPBJ/2020 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Kuningan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SEKRETARIAT DAERAH
	Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045 KUNINGAN
	Kode Pos 45512
KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 800/KPTS. 671 - BPBJ/2020	
TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN	
BUPATI KUNINGAN	
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pelayanan kepada organisasi perangkat daerah, penyedia dan masyarakat pada umumnya perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kabupaten Kuningan; b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; 9. Peraturan Bupati Kuningan nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas agar berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 26 - 02 - 2020



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 800/KPTS. 671 -BPBJ/2020

TANGGAL : 26 Februari 2020

TENTANG : TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
Penasehat	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
Ketua	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
Unsur Teknis Pendukung	:	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuningan.
Anggota	:	1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
Admin PPE	:	Heri Juheri, S.Kom
Admin Agency	:	Dudung Abdul Malik, MKM
Helpdesk	:	Susal Susila, S.IP
Verifikator	:	Onasih, SE
Trainer	:	A. Ruddyanto Maulawan S, ST



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

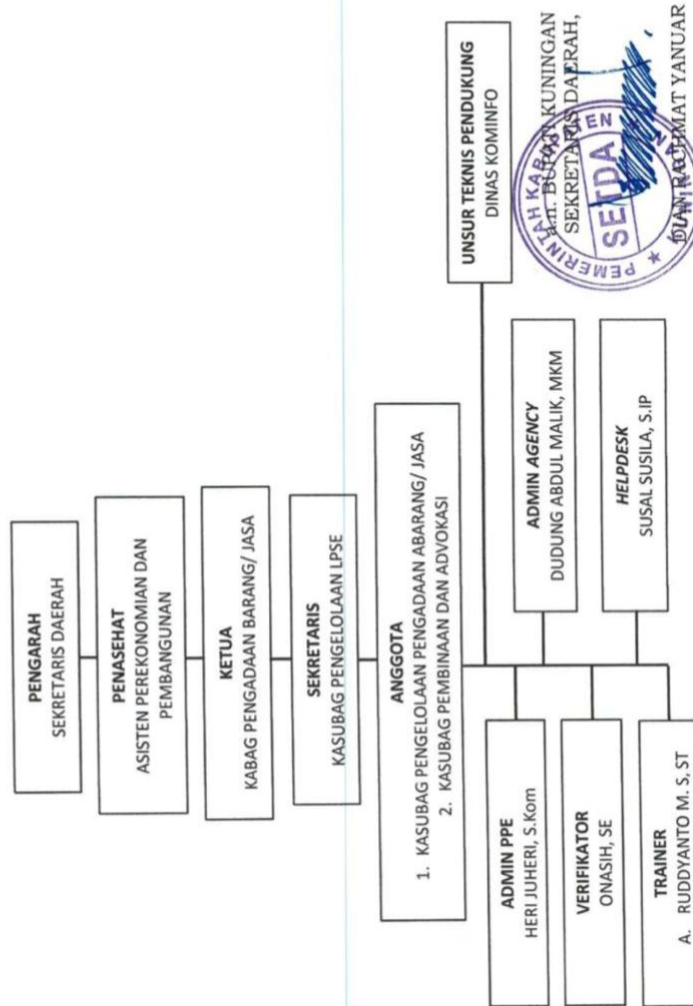
NOMOR : 800/KPTS. 671 -BPEJ/2020

TANGGAL : 26 Februari 2020

TENTANG : TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



Lampiran 7. Laporan Capaian 17 Standar LPSE Kabupaten Kuningan



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045
KUNINGAN

Kode Pos 45512

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Pengadaan barang / Jasa Setda Kabupaten Kuningan
Tanggal : 12 Januari 2023
Nomor : 488 / 09 / BPBJ/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Capaian 17 Standar LPSE Kabupaten Kuningan

Dipermaklumkan dengan hormat salah satu program pemerintah dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penerapan e-Procurement secara nasional hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sehingga dengan semakin banyaknya volume transaksi pengadaan barang dan jasa, serta permasalahan yang dihadapi oleh LPSE juga semakin beragam, maka diperlukan suatu aktifitas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas LPSE, yaitu dengan mengimplementasikan Standar Layanan LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LPSE Kabupaten Kuningan telah menyusun Standarisasi dari tahun 2017-2018 dan baru memenuhi kelulusan 10 standarisasi yang mana hal tersebut masih menginduk di Diskominfo Kabupaten Kuningan, Pada tahun 2019 LPSE Kabupaten Kuningan bergabung ke BPBJ Kabupaten Kuningan di bawah Sekretariat Daerah, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 LPSE Kabupaten Kuningan telah memenuhi 17 Standarisasi yang telah ditetapkan.

Pada Akhir tahun 2022 BPBJ Kabupaten Kuningan telah meraih sertifikat atas pemenuhan 17 Standar LPSE, dalam rangka mendukung pemenuhan kewajiban 17 standarisasi LPSE Kabupaten Kuningan berdasarkan ketentuan pemenuhan Standarisasi LPSE dalam Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Dapat kami laporkan 17 Standar LPSE yang telah diraih berdasarkan tahun capaian, sebagaimana pada tabel berikut dengan dilampiri Sertifikat 17 Standar LPSE sebagai berikut :

Tabel
Capaian 17 Standar LPSE Kabupaten Kuningan.

No	Standarisasi	Tahun Perolehan	SKPD
1	2	3	4
1	Standar-1/ Kebijakan Layanan	Maret 2017	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Standar-2/ Pengorganisasian Layanan	Maret 2017	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Standar-3/ Pengelolaan Aset	Pebruari 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	Standar-4/ Pengelolaan Risiko	Pebruari 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Standar-5/ Pengelolaan Layanan Helpdesk	Pebruari 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Standar-6/ Pengelolaan Perubahan	Maret 2017	BPBJ Setda
7	Standar-7/ Pengelolaan Kapasitas	Desember 2022	BPBJ Setda
8	Standar-8/ Sumber Daya Manusia	Pebruari 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Standar-9/ Pengelolaan Keamanan Perangkat	Pebruari 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Standar-10/ Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan	Desember 2022	BPBJ Setda
11	Standar-11/ Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan	Desember 2022	BPBJ Setda
12	Standar-12/ Pengelolaan Kelangsungan Layanan	Nopember 2021	BPBJ Setda
13	Standar-13/ Pengelolaan Anggaran	Pebruari 2018	BPBJ Setda
14	Standar-14/ Pengelolaan Pendukung Layanan	Pebruari 2018	BPBJ Setda
15	Standar-15/ Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan	Nopember 2021	BPBJ Setda
16	Standar-16/ Pengelolaan Kepatuhan	Desember 2022	BPBJ Setda
17	Standar-17/ Penilaian Internal	Desember 2022	BPBJ Setda

Pencapaian UKPBJ Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 telah memenuhi semua ketentuan dengan terpenuhinya 17 standar LPSE, yang telah terverifikasi oleh LKPP RI, dengan demikian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kuningan sudah dianggap sebagai UKPBJ yang memberikan layanan pada level-3 proaktif, hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik, Target 17 standarisasi LPSE terpenuhi maka LPSE Kabupaten Kuningan diharapkan dapat secara konsisten menerapkan standarisasi tersebut, sehingga LPSE Kabupaten Kuningan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kedepannya dan turut membantu dalam rangka pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan diucapkan terimakasih

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN KUNINGAN**

